

GOOD GOVERNANCE DAN PEREKONOMIAN NEGARA BERKEMBANG: STUDI KASUS FILIPINA

Ria Nitami¹, Ambya², Prayudha Ananta³, Asih Muwiarti⁴, Arif Darmawan⁵

Universitas Lampung, Indonesia

nitamiray@gmail.com , ambya.1959@feb.unila.ac.id , Prayudha.ananta@feb.unila.ac.id ,
asih.murwiati@feb.unila.ac.id , arif.darmawan@feb.unila.ac.id*Abstract*

Good governance is an important foundation for sustainable economic development, as it promotes bureaucratic efficiency, institutional stability and investor confidence. Countries with good governance tend to create an environment conducive to private sector growth and long-term development. This study analyzes the effect of good governance, government spending, and Foreign Direct Investment (FDI) on economic growth in the Philippines over the period 1996-2023. Using the time series regression method, the results show that government effectiveness, rule of law, and corruption control have a positive and significant effect on economic growth. In contrast, political stability has a significantly negative impact. Other indicators such as public participation, regulatory quality, FDI, and government spending do not show a significant effect. These findings emphasize the importance of governance reform as a key strategy in supporting inclusive and sustainable economic growth in the Philippines.

Keywords: *good governance, FDI, governance expenditure, economic growth*

Abstrak

Good governance merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena mendorong efisiensi birokrasi, stabilitas institusional, dan kepercayaan investor. Negara dengan tata kelola yang baik cenderung menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta dan pembangunan jangka panjang. Penelitian ini menganalisis pengaruh good governance, pengeluaran pemerintah, dan Foreign Direct Investment (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi di Filipina selama periode 1996-2023. Menggunakan metode regresi time series, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah, aturan hukum, dan pengendalian korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, stabilitas politik berdampak negatif secara signifikan. Indikator lainnya seperti partisipasi publik, kualitas regulasi, FDI, dan belanja pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi tata kelola

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pemerintahan sebagai strategi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Filipina.

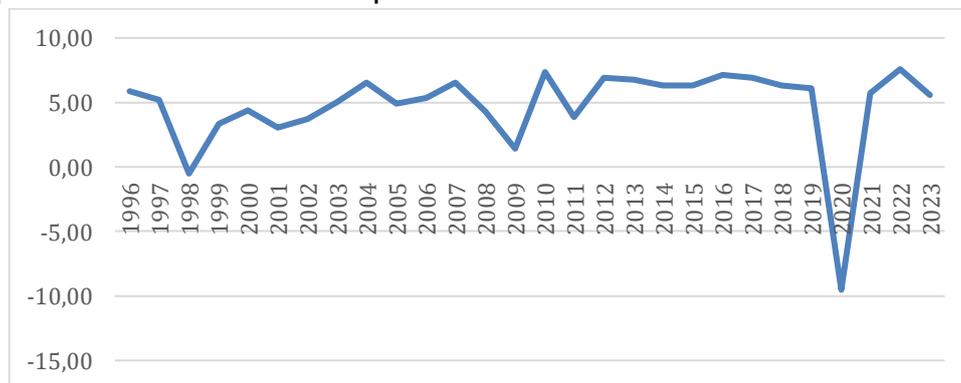
Kata kunci: *Good governance*, FDI, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi adalah aspek fundamental dari perekonomian yang berfungsi sebagai indikator utama pembangunan dan kemakmuran suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dicapai melalui peningkatan produksi dan efisiensi yang mengarah pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup yang lebih baik (Kumaat, et.al, 2019). Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dari output barang dan jasa di dalam sebuah perekonomian yang secara beriringan untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik dalam periode tertentu di suatu negara. Menurut *World Bank* [1], pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan perubahan volume output atau pendapatan riil penduduk suatu negara atau dapat juga diukur dengan perubahan PDB pada harga konstan. Indikator dasar dalam aktivitas ekonomi disuatu negara akan memberikan informasi terkait kesejahteraan ekonomi penduduknya.

Dalam konteks negara berkembang *World Bank* mengklasifikasikan negara berdasarkan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita. Negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle-income countries*) memiliki GNI per kapita antara \$4.466 hingga \$13.845 termasuk dalam negara berkembang. Di kawasan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), sebagian besar negara termasuk dalam kategori negara berkembang berdasarkan klasifikasi *World Bank* termasuk Filipina. Pada tahun 2023, ekonomi ASEAN mencapai US\$3,8 triliun menempatkannya sebagai yang terbesar ke-5 di dunia dan terbesar ke-3 di Asia.

Berikut data pertumbuhan ekonomi Filipina tahun 1996-2023:



Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Filipina Tahun 1996-2023

Sumber: *World Development Indicator by World Bank*, diolah

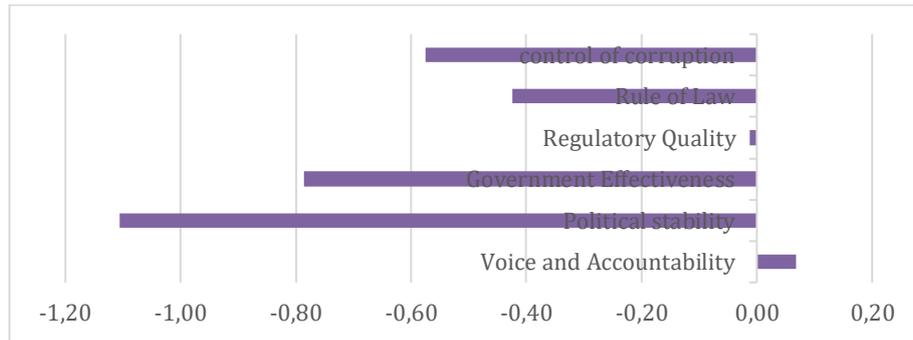
Berdasarkan grafik pertumbuhan ekonomi Filipina selama periode 1996 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, mencerminkan berbagai kondisi ekonomi domestik dan global yang memengaruhi kinerja makroekonomi negara tersebut. Pada tahun

1998, Filipina mengalami kontraksi ekonomi tajam sebagai dampak dari krisis finansial Asia, yang memicu tekanan pada sektor keuangan, nilai tukar, dan stabilitas politik. Meskipun demikian, memasuki awal 2000-an, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pemulihan bertahap yang berlanjut hingga menjelang krisis keuangan global pada tahun 2008-2009. Krisis global tersebut kembali memberikan tekanan terhadap perekonomian, meskipun tidak sedalam krisis sebelumnya, dan Filipina mampu pulih relatif cepat berkat kebijakan fiskal dan moneter yang responsif.

Periode 2010 hingga 2019 ditandai oleh pertumbuhan yang relatif stabil, dengan rata-rata pertumbuhan berada pada kisaran 5% hingga 7% per tahun. Kinerja positif ini didukung oleh peningkatan investasi, ekspansi konsumsi domestik, serta perbaikan tata kelola pemerintahan dan reformasi ekonomi struktural. Namun, stabilitas tersebut terganggu pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi tajam, lebih dari -10%. Penurunan ini mencerminkan dampak langsung dari pembatasan mobilitas, gangguan rantai pasok, dan penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi global. Meski demikian, pemulihan yang cukup kuat terjadi pada tahun-tahun berikutnya (2021-2023), mencerminkan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi dan ketahanan sektor domestik.

Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan bahwa perekonomian Filipina memiliki ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi guncangan eksternal, serta kemampuan untuk bangkit dengan cepat dari krisis, terutama ketika didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan respons kebijakan yang adaptif. Namun demikian, fluktuasi yang terjadi juga menjadi peringatan penting atas perlunya reformasi berkelanjutan dalam sistem kelembagaan, kebijakan fiskal, dan strategi investasi untuk menjaga pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks negara berkembang, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan. Tata kelola yang buruk dapat secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang penuh dengan inefisiensi, korupsi, dan kurangnya akuntabilitas [2]. Ketika tata kelola pemerintahan buruk, misalokasi sumber daya dapat terjadi, yang mengarah pada hasil ekonomi yang suboptimal. Kualitas tata kelola pemerintahan sangat penting terutama di negara berkembang. Dalam penelitian Iddawela et al. [3], menemukan bahwa lembaga pemerintah tingkat nasional tidak secara signifikan mempengaruhi aktivitas ekonomi regional, menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan lokal mungkin memainkan peran yang lebih kritis. Hubungan ini semakin didukung oleh temuan Adegboyega dan Arikewuyo [4], yang menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang buruk dapat memiliki efek negatif yang luas pada perekonomian, menekankan perlunya tata kelola pemerintahan yang baik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Berikut data *Good Government Indicator* negara Filipina tahun 1996-2023:



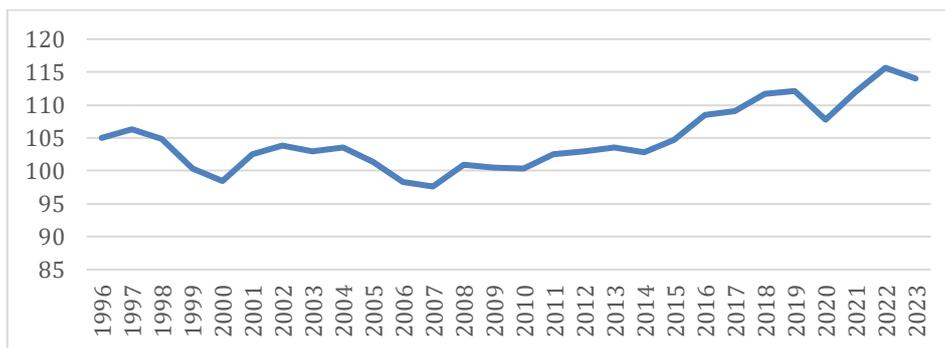
Grafik 2 Rata-Rata Indikator *good governance* 1996-2023

Sumber: *Worldwide Governance Indicators by World Bank*, diolah

Berdasarkan Grafik 2 menunjukkan rata-rata indikator *good governance* di Filipina selama periode 1996-2023, mencakup enam dimensi utama: *Voice and Accountability*, *Political Stability*, *Government Effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption*. Secara umum, hasil menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan di Filipina masih tergolong rendah, ditunjukkan oleh sebagian besar nilai indikator yang berada di bawah nol. Indikator *Voice and Accountability* mencatat nilai positif tipis, yang mencerminkan adanya ruang partisipasi publik dan kebebasan berekspresi yang relatif lebih baik dibanding dimensi lainnya. Namun, indikator *Political Stability* and absence of violence mencatat nilai paling negatif, mendekati -1,2 yang mengindikasikan tingkat ketidakstabilan politik dan ancaman kekerasan yang tinggi selama periode tersebut

Selanjutnya, *government effectiveness* juga mencatat nilai yang cukup rendah, menandakan bahwa pelayanan publik dan kualitas kebijakan pemerintah belum optimal. Hal serupa terlihat pada *regulatory quality*, yang nilainya hampir mendekati nol, mencerminkan lemahnya kapasitas pemerintah dalam merancang dan menerapkan regulasi yang mendukung pembangunan ekonomi. *Rule of Law* dan *control of corruption* juga menunjukkan skor negatif yang signifikan, mengindikasikan rendahnya kepatuhan terhadap hukum dan lemahnya sistem peradilan, serta masih tingginya tingkat korupsi di sektor publik.

Selain dari kualitas tata kelola pemerintah, perekonomian juga didorong oleh pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah di negara-negara berkembang ASEAN memiliki hubungan yang kompleks dengan pertumbuhan ekonomi [5]. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan [6]. Namun, dalam beberapa temuan mengungkapkan bahwa investasi domestik dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. Misalnya, analisis Bakari terhadap Aljazair menunjukkan bahwa investasi domestik berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa kualitas dan efisiensi investasi merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitasnya [7]. Berikut adalah perkembangan pengeluaran pemerintah Filipina tahun 1996-2023:



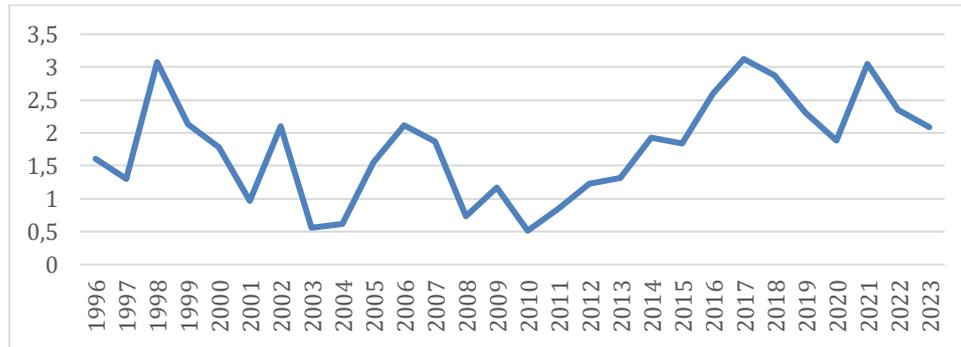
Grafik 3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan *Gross national expenditure (% of GDP)* Filipina Tahun 1996-2023

Sumber: *World Development Indicator by World Bank*, diolah

Dari grafik 3, secara umum tren pengeluaran menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung meningkat dalam jangka panjang. Pada akhir dekade 1990-an, terjadi penurunan pengeluaran pemerintah yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak krisis finansial Asia 1997-1998. Penurunan ini menunjukkan adanya pengetatan fiskal atau keterbatasan anggaran negara dalam merespons krisis.

Memasuki awal 2000-an hingga pertengahan dekade, pengeluaran pemerintah mengalami pemulihan, namun tetap berada dalam kisaran yang relatif stagnan. Baru setelah tahun 2010 terlihat peningkatan yang lebih konsisten, mencerminkan kebijakan ekspansi fiskal yang lebih agresif, terutama dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial. Peningkatan signifikan terjadi pada periode 2020-2021, yang mencerminkan respon kebijakan fiskal terhadap krisis pandemi COVID-19. Pemerintah Filipina melakukan peningkatan belanja untuk mendukung sektor kesehatan, bantuan sosial, dan program stimulus ekonomi. Meskipun terjadi sedikit penurunan setelah puncaknya, level pengeluaran pemerintah tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Tren ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam menstabilkan perekonomian Filipina, khususnya dalam merespons krisis dan mendukung pemulihan. Namun, efektivitas belanja tersebut masih sangat bergantung pada tata kelola fiskal, efisiensi alokasi anggaran, serta kemampuan pemerintah dalam mengurangi kebocoran dan korupsi.

Selanjutnya, dalam penelitian Nguyen dan Trinh [8], bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif pada perekonomian dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang akan memiliki pengaruh yang positif terutama jika disertai dengan FDI. Namun, dalam Yuliana [9] menyoroti bahwa, FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN, yang memperkuat gagasan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menarik FDI yang penting bagi perekonomian negara. Hal ini karena dengan adanya *Foreign Direct Investment* (FDI) akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan transfer teknologi [10]. Menurut Grace [11] FDI telah menjadi kekuatan pendorong di ASEAN, dengan peningkatan 1% dalam PDB berkorelasi dengan kenaikan 5,27% dalam FDI. Berikut adalah data perkembangan FDI Filipina tahun 1996-2023:



Grafik 4 Perkembangan *Foreign direct investment, net inflows (% of GDP)* Filipina 1996-2023

Sumber: *World development indicators by World Bank*, diolah

Dari grafik 4 dapat dilihat perkembangan arus masuk *Foreign Direct Investment (FDI)*, tren FDI ke Filipina menunjukkan pola yang tidak stabil namun mengalami peningkatan secara bertahap setelah melewati periode krisis. Pada akhir 1990-an, FDI meningkat tajam, terutama pada tahun 1998, yang dapat dikaitkan dengan upaya liberalisasi ekonomi dan deregulasi pasca-krisis Asia. Namun, aliran FDI mengalami penurunan tajam di awal 2000-an yang mencerminkan ketidakpastian politik dan kelemahan dalam iklim investasi saat itu.

Memasuki dekade kedua (2006-2015), aliran FDI cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih stabil, seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap pasar Filipina serta reformasi kebijakan investasi yang dilakukan pemerintah. Periode 2016 hingga 2019 mencatat peningkatan FDI yang cukup signifikan, menunjukkan bahwa Filipina menjadi tujuan investasi yang lebih menarik di kawasan Asia Tenggara. Hal ini diperkuat oleh meningkatnya permintaan infrastruktur, pertumbuhan kelas menengah, serta program kemudahan berusaha.

Namun, pada tahun 2020 terlihat penurunan FDI sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas investasi global. Meski demikian, pemulihan terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dengan FDI yang kembali naik di tahun 2021-2022, menunjukkan ketahanan dan daya tarik struktural Filipina sebagai negara tujuan investasi jangka panjang. Penurunan kembali pada tahun 2023 menunjukkan perlunya penguatan stabilitas kebijakan dan upaya menjaga kepercayaan investor dalam jangka panjang.

Secara umum, aliran tren FDI ke kawasan ASEAN cenderung positif, menunjukkan bahwa ASEAN masih menjadi tujuan investasi yang menarik bagi investor asing. Sejalan dengan penelitian di Nigeria dan Pakistan oleh Ndanusa et.al, [12] dan Bhutto, et.al [13] menunjukkan bahwa peningkatan investasi asing berkorelasi dengan tingkat pertumbuhan PDB yang lebih tinggi. FDI berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan stok modal, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja yang penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Secara keseluruhan Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama kesejahteraan suatu negara. Di ASEAN khususnya Filipina peran *good governance*, pengeluaran pemerintah, dan *Foreign Direct Investment (FDI)* berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. *Good governance* menciptakan stabilitas dan transparansi, pengeluaran pemerintah mendukung infrastruktur, sementara FDI meningkatkan lapangan kerja dan daya saing. Meskipun Filipina menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat, tantangan seperti

regulasi yang belum optimal dan fluktuasi ekonomi global tetap ada. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut World Bank (2023), pertumbuhan ekonomi adalah kondisi saat masyarakat suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan pendapatan karena adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi ini penting dihitung setiap tahunnya karena dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat. Secara umum dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari berbagai kegiatan investasi yang dapat membenahi kualitas modal, peningkatan kuantitas sumber daya produktif, dan produktivitas sumber daya melalui penemuan yang baru, inovasi dan kemajuan teknologi (Todaro & Smith, 2012). Penelitian ini menggunakan teori solow dalam buku Mankiw & Gregory (2003) menyatakan secara formal dikenal sebagai model Solow-Swan, adalah kerangka dasar dalam ekonomi neoklasik yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja atau populasi, dan kemajuan teknologi. Selain itu, teori endogen juga dimana teori ini adalah sebuah kerangka pemikiran dalam ekonomi yang berusaha menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara berkelanjutan dari dalam suatu sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Paul Romer dan Robert Lucas (1980-an) [14].

Good governance

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip dan praktik dalam mengelola kekuasaan dan sumber daya publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara transparan, akuntabel, dan partisipatif [2]. Komponen utama dari Good Governance melibatkan berbagai indikator yaitu voice and accountability (suara dan akuntabilitas), political stability and absence of violence/terrorism (stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme), government effectiveness (efektivitas pemerintah), regulatory quality (kualitas peraturan), rule of law (aturan hukum), control of corruption (pengendalian korupsi)

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah didefinisikan sebagai alokasi dana untuk penciptaan dan pemeliharaan infrastruktur dan layanan yang meningkatkan stok modal suatu negara. Pengeluaran pemerintah berkontribusi pada stok modal nasional, yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan peningkatan standar hidup (Danaj & Reçi, 2024). Bentuk dari pengeluaran pemerintah seperti investasi dalam infrastruktur, sosial, lingkungan, teknologi, dan pertanian. Dalam penelitian Scandizzo & Pierleoni (2020)

Foreign Direct Investment

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan swasta yang menjadi salah satu komponen penting dalam perekonomian suatu negara. Jenis investasi ini mencakup aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh sektor swasta, baik oleh individu maupun oleh perusahaan untuk mendapat keuntungan, dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. FDI dapat berbentuk investasi langsung, saham. Selain itu, keberhasilan FDI sangat bergantung pada stabilitas politik, keberadaan regulasi yang mendukung, serta efektivitas tata kelola pemerintahan yang mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.

3. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif *time series*. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dan menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis menggunakan teknik statistik **Invalid source specified**. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 1996-2023 pada negara Filipina. Pertimbangan dalam pemilihan rentang waktu ini karena penelitian akan berfokus pada pengaruh kualitas *good governance* dan perkembangan investasi negara Filipina, dengan ruang lingkup penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka pemikiran yang jelas dan meningkatkan validitas temuan dengan mengurangi potensi bias serta memberikan konteks yang spesifik. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi-publikasi resmi yang kredibel dan relevan yaitu *worldbank* dan *world governance indicator* dengan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif *time series*. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dan menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis menggunakan teknik statistik **Invalid source specified**. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 1996-2023 pada negara Filipina. Pertimbangan dalam pemilihan rentang waktu ini karena penelitian akan berfokus pada pengaruh kualitas *good governance* dan perkembangan investasi negara Filipina, dengan ruang lingkup penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka pemikiran yang jelas dan meningkatkan validitas temuan dengan mengurangi potensi bias serta memberikan konteks yang spesifik. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi-publikasi resmi yang kredibel dan relevan yaitu *worldbank* dan *world governance indicator* dengan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha0: Diduga *good governance*, Pengeluaran Pemerintah, dan FDI tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha1: Diduga *good governance* indeks Suara dan Akuntabilitas berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi

Ha2: Diduga *good governance* indeks Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan/Terrorisme berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi

Ha3: Diduga *good governance* indeks Efektivitas Pemerintah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi

Ha4: Diduga *good governance* indeks Kualitas Peraturan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi

Ha5: Diduga *good governance* indeks Aturan Hukum berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi

Ha6: Diduga *good governance* indeks Pengendalian Korupsi berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi

Ha7: Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha8: Diduga FDI berperan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Model persamaan regresi *time series* yang akan digunakan pada penelitian ini mengadopsi model Gujarati (2012) sebagai berikut:

$$PE = f(x)$$

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \beta_5 X5_{it} + \beta_6 X6_{it} + \beta_7 X7_{it} + \beta_8 X8_{it} + \epsilon_{it}$$

Di mana:

PE_{It-1}	: Pertumbuhan ekonomi negara i pada tahun t sebelumnya
$\beta_1 X1_{it}$: <i>good governance</i> indeks Suara dan Akuntabilitas negara i pada tahun t
$\beta_2 X2_{it}$: <i>good governance</i> indeks Suara dan Akuntabilitas negara i pada tahun t
$\beta_3 X3_{it}$: <i>good governance</i> indeks Suara dan Akuntabilitas negara i pada tahun t
$\beta_4 X4_{it}$: <i>good governance</i> indeks Suara dan Akuntabilitas negara i pada tahun t
$\beta_5 X5_{it}$: <i>good governance</i> indeks Suara dan Akuntabilitas negara i pada tahun t
$\beta_6 X6_{it}$: <i>good governance</i> indeks Suara dan Akuntabilitas negara i pada tahun t
$\beta_7 X7_{it}$: Pengeluaran pemerintah (pengeluaran pemerintah) negara i pada tahun t
$\beta_8 X8_{it}$: <i>Forign Direct Invesment</i> negara i pada tahun t
B_0	: Konstanta
B_1, \dots, B_3	: Koefisien regresi
ϵ_{it}	: Error term

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 1 Hasil Deskriptif Negara Filipina

Variabel	Ket.	Filipina
PE	std dev.	1.466
	skewness	-0.746
	kurtosis	0.467
VA	std dev.	0.154
	skewness	0.582
	kurtosis	-0.441
	VIF	4.81
PS	std dev.	0.437
	skewness	0.130
	kurtosis	-0.929
	VIF	8.01
GE	std dev.	0.155
	skewness	-0.079
	kurtosis	-0.624
	VIF	2.11
RQ	std dev.	0.144
	skewness	-0.554

Variabel	Ket.	Filipina
	kurtosis	-0.166
	VIF	4.14
RL	std dev.	0.197
	skewness	1.389
	kurtosis	1.725
	VIF	5.74
CC	std dev.	0.142
	skewness	-0.430
	kurtosis	-0.461
	VIF	2
FDI	std dev.	4.878
	skewness	0.664
	kurtosis	-0.314
	VIF	5.77
PP	std dev.	0.775
	skewness	0.080
	kurtosis	-0.813
	VIF	3.55

Sumber: Data diolah 2025, lampiran

Dari tabel 1 dapat dilihat hasil analisis uji normalitas menunjukkan bahwa seluruh variabel termasuk pertumbuhan ekonomi (PE), indikator *good governance* (VA, PS, GE, RQ, RL, CC), *Foreign Direct Investment* (FDI), dan Pengeluaran Pemerintah (PP) memiliki nilai skewness dan kurtosis dalam batas normal yakni skewness ± 2 dan kurtosis ± 7 mengacu pada kriteria normalitas menurut Byrne (2016) dan Hair et al. (2011). Misalnya pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai skewness sebesar -0,746 dan kurtosis sebesar 0,467, yang menunjukkan distribusi data yang mendekati simetris dan tidak mencolok dari segi keruncingan. Seluruh variabel lainnya menunjukkan skewness dalam kisaran -0,746 hingga 1,389, serta kurtosis antara -0,929 hingga 1,725. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi dasar regresi linear klasik. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi dasar regresi linear klasik dan dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan statistik parametrik.

Pada uji multikolinearitas untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF yang berkisar antara 2,00 hingga 8,01. Nilai tertinggi ditunjukkan oleh variabel *Political Stability* (PS) dengan VIF sebesar 8,01, sedangkan nilai terendah terdapat pada variabel *Control of corruption* (CC) dengan VIF sebesar 2,00. Hasil nilai VIF di bawah 10 menunjukkan tidak adanya indikasi multikolinearitas yang serius. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam model regresi ini tidak mengalami masalah multikolinearitas dan dapat digunakan secara simultan dalam estimasi model regresi panel secara valid dan reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Negara Filipina

VA	PS	GE	RQ	RL	CC	PP	FDI	cons	R ²	F tabel (F hitung)
-2.631 (2.672)	-3.183 (0.789)*	4.566 (2.131)**	-5.389 (3.545)	5.185 (1.871)**	7.810 (3.627)**	0.219 (0.065)*	0.457 (0.399)	-15.038 (6.927)**	0.2914	4,62 (2, 4767)

Sumber: *world bank* data diolah 2025, lampiran

Hasil uji regresi pada Tabel 2 memperlihatkan dampak berbeda dari variabel *good governance*, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan pengeluaran pemerintah (PP) untuk pertumbuhan ekonomi di Filipina. Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,2914, yang mengindikasikan bahwa sekitar 29,14% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Nilai F-hitung sebesar 4,62 dengan F tabel 2,4767 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan. Artinya, variabel *good governance*, FDI, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Filipina dalam periode pengamatan.

Model regresi menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah, supremasi hukum, pengendalian korupsi, dan belanja pemerintah merupakan determinan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Filipina. Sementara itu, stabilitas politik yang rendah terbukti menjadi hambatan utama, dan FDI belum menunjukkan kontribusi signifikan pada periode penelitian. Hasil ini menekankan perlunya perbaikan tata kelola dan kebijakan fiskal yang efektif untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Filipina.

Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis Variabel

Negara	VA	PS	GE	RQ	RL	CC	FDI	PP
Filipina	Ditolak	Diterima	Diterima	Ditolak	Diterima	Diterima	Ditolak	Ditolak

Sumber: data diolah 2025, lampiran

Dari tabel 3, uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Filipina. Berdasarkan hasil pengujian, terdapat perbedaan signifikan di antara indikator *good governance*, FDI, dan pengeluaran pemerintah. *Voice and Accountability* (VA) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Ho diterima), yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi publik dan kebebasan sipil belum memiliki kontribusi nyata dalam mendorong aktivitas ekonomi di Filipina selama periode penelitian. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya efektivitas lembaga demokrasi atau rendahnya daya dorong kebebasan berekspresi terhadap iklim investasi dan produksi.

Political Stability (PS) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Ho ditolak). Stabilitas politik yang rendah berdampak negatif terhadap pertumbuhan, menunjukkan bahwa ketidakpastian politik, ancaman kekerasan, atau konflik domestik menjadi faktor penghambat utama dalam perkembangan ekonomi jangka panjang di Filipina. *Government effectiveness* (GE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Ho ditolak). Efektivitas birokrasi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta penyediaan layanan publik yang berkualitas, terbukti memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan efisien bagi kegiatan ekonomi.

Regulatory Quality (RQ) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Ho diterima). Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas regulasi pemerintah, meskipun penting

belum cukup optimal dalam mendorong aktivitas ekonomi. Bisa jadi karena masih lemahnya implementasi kebijakan yang pro-bisnis atau tingginya hambatan regulatif di lapangan. *Rule of Law* (RL) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (*Ho ditolak*). Penegakan hukum yang kuat dan kepastian hukum berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta melindungi hak kepemilikan yang mendorong produktivitas ekonomi. *Control of corruption* (CC) juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (*Ho ditolak*). Ini menandakan bahwa penurunan tingkat korupsi memberikan dampak positif terhadap efisiensi alokasi sumber daya, peningkatan kepercayaan investor, dan efektivitas pengeluaran publik.

Foreign Direct Investment (FDI) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (*Ho diterima*). Meskipun arah hubungan positif, hasil ini menunjukkan bahwa arus FDI ke Filipina belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang nyata terhadap output ekonomi, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan transfer teknologi, sektor investasi yang tidak produktif, atau efek jangka panjang yang belum terealisasi. Pengeluaran Pemerintah (PP) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (*Ho diterima*). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja publik belum cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan, kemungkinan karena masalah efisiensi anggaran, inefisiensi birokrasi, atau belanja yang tidak produktif.

Hasil uji t memperlihatkan bahwa di antara delapan variabel independen, hanya empat yang secara statistik signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Filipina: *Political Stability*, *Government Effectiveness*, *Rule of Law*, dan *Control of Corruption*. Ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan penegakan hukum sebagai fondasi utama bagi strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.2 Pembahasan

Secara parsial, hasil estimasi menunjukkan bahwa *Political Stability* (PS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien -3,183 dan signifikansi $p < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik memiliki dampak yang merugikan terhadap perekonomian. *Government effectiveness* (GE) memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 4,566 ($p < 0,05$), menandakan bahwa efektivitas layanan publik dan kualitas kebijakan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sejorda et.al. (2025) menyatakan meski tidak signifikan, indikator efektivitas pemerintah tetap penting dalam mendukung kebijakan pembangunan, investasi sosial, dan infrastruktur yang dapat memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Rule of Law (RL) juga berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 5,185 dan signifikansi $p < 0,05$. Hal ini menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam mendukung aktivitas ekonomi dan perlindungan hak kepemilikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Bernales (2024) *Control of corruption* (CC) memiliki dampak paling kuat dengan koefisien 7,810 ($p < 0,05$), yang menunjukkan bahwa peningkatan integritas dan pemberantasan korupsi secara signifikan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian Panungbayan (2024) dimana korupsi menyebabkan hilangnya dana negara, menurunkan kualitas infrastruktur, serta menciptakan pemborosan dan biaya peluang yang tinggi. Siklus ini menghambat inisiatif pembangunan ekonomi baru dan menunda pertumbuhan ekonomi Filipina secara substansial. *Regulatory Quality* (RQ) dan *Voice and Accountability* (VA) masing-masing menunjukkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak signifikan secara statistik ($p > 0,05$). Temuan ini sejalan dengan penelitian Bernales (2024) yang menyatakan perbaikan kualitas regulasi tidak selalu sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemungkinan karena implementasi regulasi yang terlalu ketat atau tidak sesuai dengan

kebutuhan pasar lokal. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan regulasi atau keterbatasan partisipasi publik yang belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan.

FDI memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien 0,457. Meskipun demikian, arah hubungan ini sesuai dengan teori bahwa FDI berkontribusi terhadap pembangunan, meski efeknya mungkin tertunda atau bergantung pada sektor tujuan investasi. Temuan ini sejalan dengan publikasi Alliot Global Alliance (2024) yang menyatakan *Foreign Direct Investment* (FDI) secara konsisten berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Filipina. Pengeluaran Pemerintah (PP) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien 0,219 ($p < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong permintaan agregat dan aktivitas ekonomi. Nilai konstanta (*cons*) sebesar -15,038 dengan signifikansi $p < 0,05$ menunjukkan bahwa dalam kondisi semua variabel independen bernilai nol, pertumbuhan ekonomi cenderung negatif, yang menandakan pentingnya kontribusi masing-masing variabel terhadap pertumbuhan.

Pada hasil dari Analisis Regresi Linear menunjukkan persamaan yang dapat dijelaskan seperti berikut :

$$PE = -15.038 - 2.631 X_1 - 3.183 X_2 + 4.566 X_3 - 5.389 X_4 + 5.185 X_5 + 7.810 X_6 + 0.219 X_7 + 0.457 X_8$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan :

a) Intercept ($B_0 = -15.038$)

Jika semua variabel independen bernilai nol, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan -15.038. Nilai ini jarang diinterpretasikan secara praktis, tapi berguna sebagai titik awal model.

b) X_1 (Voice and Accountability: -2.631)

Setiap peningkatan 1 poin dalam indeks suara dan akuntabilitas akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2.631 poin. Artinya, partisipasi publik belum tentu langsung mendorong pertumbuhan—bisa jadi karena ketidakefisienan dalam pelaksanaannya.

c) X_2 (Political Stability: -3.183)

Peningkatan stabilitas politik justru berdampak negatif sebesar 3.183 poin. Ini menunjukkan bahwa di negara ASEAN tertentu, stabilitas tidak selalu menjamin pertumbuhan—bisa jadi karena stagnasi kebijakan atau kontrol otoriter.

d) X_3 (Government Effectiveness: +4.566)

Efektivitas pemerintah berpengaruh positif, meningkatkan pertumbuhan sebesar 4.566 poin. Pemerintahan yang efisien mendorong pembangunan dan kepercayaan pasar.

e) X_4 (Regulatory Quality: -5.389)

Kualitas regulasi yang meningkat justru menurunkan pertumbuhan. Ini bisa disebabkan regulasi terlalu kompleks atau tidak berpihak pada sektor produktif.

f) X_5 (Rule of Law: +5.185)

Kepatuhan hukum dan sistem peradilan yang baik memberikan pengaruh positif, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kepercayaan hukum dan kepastian usaha.

g) X_6 (Control of Corruption: +7.810)

Pengendalian korupsi adalah variabel dengan pengaruh paling kuat dan positif. Makin rendah tingkat korupsi, makin tinggi pertumbuhan ekonomi.

h) X_7 (Pengeluaran Pemerintah: +0.219)

Pengaruhnya positif namun sangat kecil, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah

belum terlalu signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN.

i) X8 (Foreign Direct Investment: +0.457)

FDI juga berpengaruh positif namun lemah, mengindikasikan perlunya sinergi antara FDI dan kualitas institusi agar berdampak nyata.

Model ini menyoroti bahwa efektivitas pemerintah, penegakan hukum, dan pengendalian korupsi adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi, sementara stabilitas politik dan kualitas regulasi justru dapat menjadi hambatan dalam konteks ASEAN. FDI dan belanja pemerintah memberikan pengaruh positif, namun tidak signifikan tanpa tata kelola yang baik.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) merupakan indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, khususnya Filipina. Hasil analisis regresi mengindikasikan bahwa indikator *government effectiveness*, *rule of law*, dan *control of corruption* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa perbaikan birokrasi, penegakan hukum, dan integritas kelembagaan merupakan prasyarat utama dalam menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan produktif. Sebaliknya, indikator *political stability and absence of violence* menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, mengindikasikan bahwa ketidakstabilan politik merupakan hambatan struktural bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, variabel *voice and accountability*, *regulatory quality*, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan pengeluaran pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas, baik karena kendala implementasi kebijakan maupun belum optimalnya efektivitas belanja dan investasi yang dilakukan. Model regresi yang digunakan memiliki nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,2914, yang berarti sekitar 29,14% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model. Dengan demikian, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih holistik dan terintegrasi guna memperkuat aspek tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efektivitas fiskal serta iklim investasi, sebagai landasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di negara berkembang seperti Filipina.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Filipina disarankan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas layanan publik guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Penegakan supremasi hukum perlu diperkuat untuk menciptakan kepastian hukum dan menarik investasi. Pengendalian korupsi harus diprioritaskan melalui transparansi anggaran dan pengawasan yang ketat. Stabilitas politik juga penting, namun harus tetap adaptif terhadap reformasi. Pengeluaran pemerintah sebaiknya difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur dan pendidikan agar lebih efektif. Selain itu, arus FDI perlu diarahkan ke sektor strategis dan didukung dengan regulasi serta insentif yang kondusif agar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Bank, "Economy," 2023. [Online]. Available: <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/themes/economy.html>.

- [2] Worldbank, "Worldwide Government Indicator," 2024. [Online]. Available: <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>. [Accessed 01 01 2024].
- [3] Y. Iddawela, N. Lee and A. Rosriguez-Poze, "Quality of Sub-National Government and Regional Development in Africa," *The Journal of Development Studies*, pp. 57(8), 1282-1302, 2021.
- [4] R. Adegboyega and K. Arikewuyo, "Good Governance and Economic Development in Nigeria," *Job*, pp. 9(1), 7-22, 2020.
- [5] N. Canh and N. Phong, "The Linkage between Public, Private Investment and Economic Growth Evidence for the Developing ASEAN and Asian Countries," *Journal of Economics and Public Finance*, vol. 3, no. 4, pp. 580-595, 2017.
- [6] M. A. M. Warner, Public investment as an engine of growth, International Monetary Fund, 2014.
- [7] S. Bakari, "The Impact of Domestic Investment on Economic Growth New Policy Analysis From Algeria," *Bulletin of Economic Theory and Analysis*, pp. 3(1), 35-51, 2018.
- [8] C. Nguyen and L. Trinh, "The impacts of public investment on private investment and economic growth," *Journal of Asian Business and Economic Studies*, vol. 25, no. 1, pp. 15-32, 2018.
- [9] S. Yuliana, "The effect of foreign debt, foreign direct investment, and inflation on economic growth in 7 asean countries for the period 2012-2020," *International Journal of Islamic Education Research and Multiculturalism (Ijierm)*, vol. 5, no. 2, pp. 247-257, 2023.
- [10] N. Phong, "The Linkage between Public, Private Investment and Economic Growth: Evidence for the Developing ASEAN and Asian Countries," *Journal of Economics and Public Finance*, vol. 3, no. 4, pp. 580-595, 2017.
- [11] G. Grace, "Factors affecting Inward foreign direct investment: case of ASEAN country," *Infoartha*, vol. 3, no. 2, 2019.
- [12] A. Ndanusa, A. Adamu and B. Madu, "Analysis of Private Sector Investment on Economic Growth in Nigeria," *The æLapai journal of Economics*, vol. 8, no. 1, pp. 221-233, 2024.
- [13] M. Bhutto, E. Shaikh and P. Shah, "The Impact of Public and Private Investment on Economic Growth of Pakistan," *Progressive research journal of arts & humanities*, vol. 4, no. 2, 2023.
- [14] B. Wijayanto, "Teori Pertumbuhan Endogenous (Endogenous Growth Theory)," *paper*, 2019.
- [15] N. Mankiw and Gregory, *Teori Makroekonomi*, 5 ed., Jakarta: Erlangga, 2003.
- [16] E. Danaj and L. Reçi, "Public investment, economic growth and efficiency," *Agora International Journal of Juridical Sciences*, vol. 18, no. 1, pp. 153-164, 2024.
- [17] P. Scandizzo and M. Pierleoni, "Short and Long-Run Effects of Public Investment: Theoretical Premises and Empirical Evidence," *Theoretical Economics Letters*, vol. 10, no. 4, pp. 834-867, 2020.

